



**PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PERTANIAN**

PROPOSAL

BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020

KEGIATAN :
**PENGELOLAAN TENAGA PENYULUH
(THL-TBPP PROVINSI JAWA BARAT)**



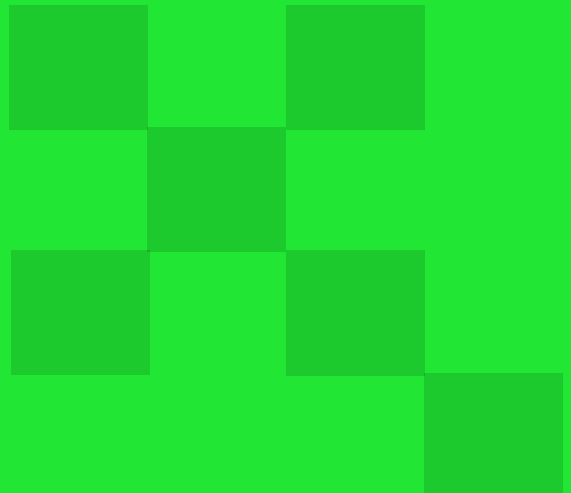
Alamat :

Komplek Perkantoran Cimaja
Jl. Raya Cisolok KM. 10 - Palabuhanratu



Telp & e-mail :

Telp. (0266) 436407, 436408
dinas pertanian_kab.sukabumi@yahoo.co.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan usulan kegiatan “Pengelolaan Tenaga Penyuluh (THL-TBPP Provinsi Jabar)” dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 dalam rangka meningkatkan kinerja penyuluh Tenaga Harian Lepas pertanian di Kabupaten Sukabumi ini dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan didalamnya.

Kami sangat berharap proposal ini dapat berguna walaupun kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam proposal ini masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan proposal yang akan kami susun di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga proposal yang telah kami susun ini dapat berguna dan memberikan gambaran mengenai kebutuhan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam mendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Sukabumi. Demikian proposal ini kami susun untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Sukabumi, Maret 2019

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



Ir. H. SUDRAJAT, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620422 198803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sasaran	2
1.4. Keluaran	3
 BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH, PENYULUH PERTANIAN DAN SDM PETANI/KELEMBAGAAN	
2.1. Keadaan Wilayah	4
2.2. Keadaan Penyuluh Pertanian	7
2.3. Keadaan SDM Petani/Kelembagaan	7
 BAB III. OPTIMALISASI KINERJA PENYULUH THL-TBPP PROVINSI JAWA BARAT DAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL	
3.1. Optimalisasi Kinerja Penyuluh TBPP Prov. Jabar.....	9
3.2. Kebutuhan Biaya	10
 BAB IV. PENUTUP	12
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya akselerasi pemberdayaan petani khususnya untuk membangun dan mewujudkan kemandirian para petani dalam mengembangkan usahatani secara *integratedi dengan off farm hulu* dan *off farm hilir* ditinjau dari jumlah penyuluh pertanian, pada saat ini dihadapkan dengan semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian, karena ada sebagian yang telah memasuki purna bakti, alih jabatan dan sebagainya, walaupun sudah dibantu dengan adanya penyuluh CPNS tetapi belum memadai karena harus membina kelembagaan tani di 381 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, keberadaan penyuluh THL-TBPP Propinsi Jawa Barat masih sangat di perlukan dan perlu ditunjang dengan honor/ insentif bulanan yang memadai .

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, upaya untuk memfasilitasi terwujudnya kemandirian petani merupakan tugas pokok dari para penyuluh yang salah satunya penyuluh pertanian PNS. Dalam konteks mewujudkan kemandirian inilah, para penyuluh pertanian harus mampu memfasilitai, memandu, membimbing serta mendampingi para petani agar mereka memiliki kemampuan tidak lagi nerfokus paga kegiatan usaha (*on farm*), melainkan juga harus mampu mengembangkan usahanya secara terintegrasi dengan *off farm hulu* dan *off farm hilir*.

Seiring hal tersebut dalam Permentan Nomor 72 /Permantan/OT140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh pertanian , keberadaan Tenaga Harian Lepas TB Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada pelaku utama dalam mengembangkan agribisnis dan membantu Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa. Selama ini, THL-TB Penyuluh Pertanian telah memberikan

kontribusi yang nyata pada peningkatan produksi dan pendapatan bagi petani, sehingga pemberian honor/insentif bulanan bagi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang memadai akan mendorong peningkatan kinerjanya dan diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian.

1.2. Tujuan

- 1) Meningkatkan motivasi kerja penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa barat dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.
- 2) Meningkatkan kinerja penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa barat dalam penyelenggaraan penyuluhan untuk mendukung tercapainya akselerasi peningkatan produktivitas/produksi pertanian dan pendapatan petani.

1.3. Sasaran

Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa barat walaupun dengan jangkauan binaan yang jauh dan jalan yang relatif kurang baik dalam melaksanakan proses pemberdayaan kelembagaan petani/kelompoktani, Gabungan Kelompoktani (Gapoktan), Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes), Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2020, yaitu dalam mengelola proses produksi (budidaya) komoditi tanaman pangan pokok (padi, jagung, kedele, kacang tanah), komoditi hortikultura unggulan (sayuran, buah-buahan, tanaman hias), komoditi peternakan, komoditi perkebunan dan kehutanan melalui sistem penyuluhan pertanian secara terarah dan berencana.

1.4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dengan adanya Honor/insentif bulanan penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 bagi penyuluh pertanian sebagai Penunjang Penyuluhan Pertanian diharapkan dapat Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan.

II. GAMBARAN UMUM WILAYAH, PENYULUH PERTANIAN DAN SDM PETANI / KELEMBAGAAN

2.1. Keadaan Wilayah Di Kabupaten Sukabumi

Luas Wilayah Kabupaten Sukabumi 409.402 ha, sebagian besar berupa lahan darat seluas 342,599 ha atau 83,50% sedangkan lahan sawah hanya 66,803 ha atau 16,50%. Luas lahan darat/kering sebagian besar berupa tegalan atau ladang yaitu sekitar 105.513 ha atau 30,23%. Data penggunaan lahan secara rinci disajikan pada table 1 berikut dibawah ini.

Tabel 1. Data Ekosistem dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
1.	Lahan sawah		
	a. Berpengairan teknis	5.582	83,55
	b. Berpengairan ½ teknis	5.101	76,35
	c. Berpengairan sederhana/PU	5.591	83,69
	d. Berpengairan pedesaan	15.553	23,28
	e. Berpengairan tadah hujan	10.959	16,40
	f. Berpengairan lainnya	24.017	35,95
	JUMLAH	66.803	100
2.	Lahan kering		
	a. Pekarangan	18.440	53,82
	b. Tegalan/ladang	105.413	30,76
	c. Penggembalaan	4.235	12,36
	d. Sementara tidak diusahakan	5.180	15,11

3	e. Hutan rakyat	46.239	13,49
	f. Hutan negara	83.710	24,43
	g. Perkebunan	72.490	21,15
	h. Lain-lain	5.025	14,66
	Lahan lainnya		
	- Tambak	200	0,05
	- Kolam/Empang	1.667	0,48
J u m l a h		342.599	100

Sumber : Sukabumi dalam angka, 2018

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya bergelombang di daerah bagian selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain Gunung salak dan Gunung Gede di bagian utara dan tengah yang masing-masing mempunyai puncak ketinggian 2.211 m dan 2.958 m, menyebabkan keadaan lereng yang sangat miring (lebih besar dari 35 °) meliputi 29% dari luas Kabupaten Sukabumi. Kemiringan antara 13 – 35 ° meliputi 37 persen dan kemiringan 2 – 13 ° meliputi 21 persen, sisanya daerah datar meliputi 13 persen dari luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, tercatat bahwa rumah tangga pertanian (RTP) mencapai 274.769 rumah Tangga (RT) atau mencapai kurang lebih 45,73 % dari total rumah tangga (RT) sebanyak 600.852 Rumah Tangga (BPS 2013). Keadaan umum sosial ekonomi rumah tangga pertanian tersebut secara rinci digambarkan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Keadaan Umum Sosial Ekonomi Petani Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Jumlah rumah Tangga (RT)	Persentase (%)	Keterangan
1	Keadaan Rumah Tanga Pengguna lahan sawah a) Pemilik b) Pemilik Penggarap c) Penggarap d) Buruh Tani	 27.477 91.589 88.814 67.318	 10,00 34,00 30,01 24,99	
2	Keadaan Rumah Tanga Pengguna lahan kering a. Pemilik b. Pemilik Penggarap c. Penggarap d. Buruh tani	 35.046 94.284 70.039 70.012	 13,01 35,00 26,00 25,99	
3	Penguasaan lahan pertanian a. Lahan Sawah (Ha) • <0,10 Ha • 0,10 – 0,49 Ha • 0,50 – 0,99 Ha • 1,00 – 1,99 Ha • 2,00 = 2,99 Ha • ≥ 3,00 Ha	 121.130 95.496 27.058 12.212 11.216 2.270	 44.97 35.45 10.04 4.53 4.16 0,84	
4	Penguasaan lahan pertanian b. Lahan Kering (Ha) • <0,10 Ha • 0,10 – 0,49 Ha • 0,50 – 0,99 Ha • 1,00 – 1,99 Ha • 2,00 = 2,99 Ha • ≥ 3,00 Ha	 88.761 93.018 6.151 21.766 15.193 14.493	 32.95 34.53 13.42 8.08 5.64 5.38	

Sumber : Sukabumi dalam angka, 2018

Pada tabel di atas tampak bahwa keadaan umum sosial ekonomi petani kabupaten Sukabumi relatif sangat bervariasi. Fenomena tersebut, tentunya akan menimbulkan terjadinya keragaman karakteristik dan orientasi dan pola perilaku kesehariannya, termasuk tingkat kebutuhan, pola komunikasi, orientasi usaha daya serap informasi, permasalahan yang dihadapi dan sebagainya, yang pada gilirannya juga akan menuntut adanya spesifikasi pembinaan dan bimbingan maupun pendampingan dari para

penyuluh pertanian sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani yang ada di setiap wilayah binaannya.

2.2. Keadaan Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Sukabumi

Penyuluh pertanian di Kabupaten Sukabumi sebanyak 233 orang, terdiri dari 99 penyuluh PNS, 74 orang penyuluh pusat /THL-TBPP pusat dan 60 orang penyuluh propinsi/ TB-THL provinsi, yang tersebar di 47 kecamatan di 381 desa dan 5 kelurahan dengan keberadaan sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten 5 orang
- b. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kec./BPP 47 orang
- c. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat lapangan/desa 181 orang.

Dengan jumlah penyuluh diatas maka rasio antara penyuluh pertanian dengan rumah tangga pertanian (petani) adalah 1:1593. Rasio ini tentunya akan sangat berat dalam pelaksanaan operasional penyuluhan, apalagi usia sebagian penyuluh pertanian sebagian diantaranya sudah di atas 50 tahun bahkan sudah ada yang masuk purna bakti dan baru 69 orang yang mendapat BOP dari pemerintah pusat/propinsi. Kondisi ideal rasio penyuluh pertanian dengan petani adalah 1:400-480. Dilihat dari kualitas penyuluh, bagi penyuluh senior kemampuan menguasai metode penyuluhan cukup kompeten, tetapi penguasaan dalam informasi teknologi sangat terbatas.

2.3. Keadaan SDM Petani / Kelembagaan Di Kabupaten Sukabumi

Kelembagaan petani/kelompok tani/Gabungan kelompok tani (gapoktan) / dan lembaga tani lainnya yang perlu dibina untuk meningkatkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya adalah sebagai berikut :

a. Kelompoktani : 3.140 (156.785 orang anggota kelompoktani) terdiri dari :

- Kelompok Pemula	:	921	kelompok
- Kelompok Lanjut	:	1.782	kelompok
- Kelompok Madya	:	412	kelompok
- <u>Kelompok Utama</u>	:	<u>25</u>	<u>kelompok</u>
Jumlah	:	3.140	kelompok

b. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) : 350 kelompok (2.817 orang anggota)

c. Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) : 152 unit

d. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) : 19 unit

e. Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) : 26 unit

Sehubungan dengan rasio antara penyuluh dengan petani, paling sedikit ada 2 (dua) upaya yang dapat ditempuh, yaitu : (1) Rekrutmen penyuluh pertanian baru dan (2) Peningkatan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian yang ada. Namun demikian langkah rekrutmen ini pada dasarnya merupakan upaya yang cukup memerlukan anggaran biaya yang tidak kecil dan apabila tidak disertai dengan upaya peningkatan dukungan fasilitas, sarana/prasarana dan anggaran operasional serta pengembangan kemampuan profesionalnya, upaya tersebut tidak akan banyak berarti. Oleh karena itu dalam jangka pendek terutama dalam akselerasi pemberdayaan petani hendaknya upaya tersebut lebih difokuskan pada upaya optimalisasi kinerja penyuluh pertanian yang sudah ada, yang dalam operasionalnya didukung dengan biaya operasional yang memadai.

III. OPTIMALISASI KINERJA PENYULUH THL-TBPP PROVINSI JAWA BARAT DAN KEBUTUHAN BIAYA OPERASIONAL

3.1. Optimalisasi Kinerja Penyuluh TBPP Provinsi Jawa Barat

Dalam rangka akselerasi pemberdayaan petani, ada 3 (tiga) upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja yang akan dilaksanakan : (1) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat lapangan, (2) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat BPP/Kecamatan dan (3) Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Optimalisasi Kinerja Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan, selain akan diarahkan pada pemantapan tugas pokok sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor : Per/02/Menpar/2/2008 tentang jabatan fungsional Penyuluh pertanian dan Angka Kreditnya juga difokuskan untuk memotivasi, mendorong dan menggerakkan agar para penyuluh pertanian mampu meningkatkan frekuensi dan intensitas kerjanya terutama dalam penyuluhan pertanian lapangan harus mampu melaksanakan kunjungan ke kelompok tani selama 16 hari kerja (1 hari 2 kelompok). Sisanya sebanyak 8 hari kerja digunakan untuk mengikuti pelatihan dan atau pertemuan di BPP, penyelesaian administrasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat koordinatif dan konsultatif.
- b. Bagi penyuluh pertanian tingkat BP3K/BPP/kecamatan, peningkatan optimalisasi selain diarahkan pada pemantapan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagaimana di atas, juga akan difokuskan agar mereka mampu memfasilitasi berbagai penyelenggaraan pelatihan maupun pertemuan-

pertemuan di BPP/Kecamatan serta mampu melaksanakan bimbingan/supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian tingkat lapangan.

- c. Penyuluh Pertanian yang bertugas di tingkat kabupaten, Optimalisasi kinerjanya lebih difokuskan agar mereka mampu menjadi perancang berbagai materi maupun metode penyuluhan, melatih para penyuluh serta melakukan bimbingan/supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh pertanian yang ada di tingkat BPP/kecamatan dan lapangan.

3.2. Kebutuhan Biaya

Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat dibutuhkan dukungan Honor.insentif sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan/penyuluh. Besarnya kebutuhan biaya ini mengacu pada biaya yang diperlukan penyuluh pertanian dalam rangka memfasilitasi pembelajaran para petani/kelembagaan sebanyak 20 hari kerja/bulan \pm Rp. 100.000,-/ hari kerja dan atau Rp. 2.000.000 ,-/ bulan. Secara keseluruhan honor/insentif yang diperlukan untuk penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat sebanyak 60 orang sebesar Rp 1.440.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

Dengan demikian untuk mendukung upaya optimalisasi kinerja penyuluh pertanian, di Kabupaten Sukabumi untuk 60 orang penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini dan dalam lampiran 1.

Tabel 3. Kebutuhan Biaya Operasional Penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat di
Kabupaten Sukabumi

No	Uraian	Jumlah Penyuluh (Orang)	Kebutuhan Honor/Insentif per bulan (Rp/bulan/orang)	Jumlah kebutuhan Honor/Insentif dalam satu tahun (12 bulan) (Rp)
1	Penyuluh Pertanian tingkat Lapangan/Desa	60	2.000.000,-	1.440.000.000,-
JUMLAH		60	2.000.000,-	1.440.000.000,-

Besarnya biaya honor/insentif bagi Penyuluh THL TBPP Propinsi Jawa Barat yang dibutuhkan tersebut diatas diperlukan para penyuluh dapat melaksanakan kegiatan dengan lebih optimal.

IV. PENUTUP

Sesuai dengan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, akselerasi pemberdayaan petani di Kabupaten sukabumi akan dilaksanakan melalui peningkatan optimalisasi kinerja penyuluh pertanian mulai dari tingkat lapangan sampai tingkat kabupaten dengan dibantu oleh penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat sebanyak 60 orang. Upaya optimalisasi ini memerlukan dukungan honor penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat untuk 12 bulan sebesar = **Rp. 1.440.000.000** , (*Satu Milyar Empat ratus Empat Puluh Juta rupiah*). Mengingat keterbatasan APBD kabupaten, untuk itu dimohon biaya operasional bagi penyuluh pertanian tersebut dapat kiranya dipenuhi dari tingkat Provinsi melalui bantuan keuangan Bapak Gubernur Jawa Barat.

Demikian permohonan honor/insentif biaya bagi 60 orang penyuluh THL-TBPP Provinsi Jawa Barat di Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2020, atas dikabulkannya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Sukabumi, Maret 2019

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



Ir. H. SUDRAJAT, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620422 198803 1 006